RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2018

KECAMATAN BENJENG
KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN BENJENG

Jalan Raya Benjeng, nomor 08 Telepon (031)7923681

B E N J E N G

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BENJENG

Nomor : 050/ /437.106/2017

Tentang

RENCANA KERJA KECAMATAN BENJENG

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

CAMAT BENJENG

Menimbang : a. bahwa untuk melakanakan amanat pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 24 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015, Rencana Kerja Kecamatan Benjeng ditetapkan dengan SK Camat Benjeng.

: b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan SK Camat Benjeng tentang Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tahun 2018.

Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik nomor 70 tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan;
13. Peraturan Bupati Gresik nomor 15 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BENJENG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Benjeng Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Camat Benjeng adalah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Benjeng untuk periode tahun 2018;
4. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah;
11. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;

12. Musrenbang Kecamatan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Benjeng untuk periode tahun 2018;

(2) Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2018 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018;

(3) Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2018, didahului dengan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Benjeng;

(4) Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2018.

b. Pedoman bagi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2018 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 2

Uraian Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2018 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Benjeng
Pada tanggal : Maret 2017

CAMAT BENJENG

NURYADI, S.PD. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671020 198803 1 009

LAMPIRAN

RENCANA KERJA (RENJA)

SKPD KECAMATAN BENJENG

KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

ab I Pendahuluan 1

Bab II Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu 3

ab III Tujuan, sasaran, program dan kegiatan 8

ab IV Penutup 11

ampiran Matriks Renja usulan program kegiatan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng tahun 2018 diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2016-2021 berakhir pada tahun 2021. Dengan demikian untuk menghindari kekosongan dasar perencanaan pada tahun 2018 maka berdasarkan telaah terhadap kesinambungan perencana pembangunan dapat disimpulkan bahwa perumusan Renja SKPD tahun 2018 harus menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) tahun 2005 – 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja SKDP Kecamatan Benjeng memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partsipasi masyarakat. Dengan mengacu prioritas pembangunan dan secara rinci dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan. Dengan demikian kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Renja SKPD Kecamatan Benjeng menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan di setiap sub unit kerja di lingkungan Kecamatan Benjeng.

B. Landasan Hukum

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Tahun 2018, antara lain meliputi:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Tahun 2018 disusun adalah sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan bagi sub unit kerja di lingkungan Kecamatan Benjeng, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang menyimpang dari perencanaan yang sudah ditentukan.

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Tahun 2018 dibuat dengan tujuan untuk menjadi pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD.

D. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Renja tahun 2018 secara garis besar memuat

1) Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan
2) Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD
3) Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.
4) Bab IV Penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan Kecamatan Benjeng dalam melaksanakan Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi Kinerja (*performance appraisal*) nerupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran-ukuran dan Indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi Kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program / kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya

- Kinerja Keuangan

  Dari pagu anggaran tahun 2016 belanja langsung Rp 659.785.950 yang dapat direalisasikan sebesar Rp 651.711.571,- ada efesiensi sebesar Rp 8.074.379,- atau 1,22%. Capaian kinerja keuangan sebesar 98,78%.
- Kinerja kegiatan

  Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, target indikator sasaran mencapai 100% hingga 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kantor Kecamatan Benjeng mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliput pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pemembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya.

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Benjeng tahun 2016 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Benjeng, tahun 2016 sudah dilakukan survey IKM, hasilnya mendapat skor 75,12 atau dalam kategori BAIK.

Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Benjeng. Kinerja pelayanan didukung oleh system yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Adapun kendala yang kerap menjadi pengaduan masayarakat adalah e-KTP yang belum bisa mencetak dan bencana banjir rutin tahunan yang menggangu sarana prasrana kantor Kecamatan Benjeng.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik nomor 21 tahun 2013 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan, susunan organisasi Kantor Kecamatan Benjeng terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pembangunan
6. Seksi Ekonomi
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan Benjeng mempunyai rincian tugas, membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas, Camat melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a. Perizinan
b. Rekomendasi
c. Koordinasi
d. Pembinaan
e. Pengawasan
f. Fasilitasi
g. Penetapan
h. Penyelenggaraan, dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternal dan efesiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
f. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;

j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan di wilayah kerja kecamatan;
l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksaan kebijakan melalui program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Benjeng, tidak terlepas dari isu-isu penting yang melandasi lahirnya kebijakan SKPD, antara lain :

- Pelayanan publik
  Pelayanan prima kepada masyarakat menjadi tujuan utama aparatur Kantor Kecamatan Benjeng
- Penataan administrasi kantor
  Pemenuhan administrasi kantor dan alat rumah tangga kantor dalam rangka menunjang kinerja SKPD.
- Pembinaan administrasi pemerintahan desa
  Kinerja pemerintahan desa dengan SDM yang terbatas perlu diberikan pembinaan secara berkala. Sehingga buku administrasi desa dan dokumen lain bisa tersusun sesuai dengan ketentuan.
- Keamanan lingkungan
  Pengendalian ketentraman dan ketertiban lingkungan yang kondusif.
- Pemberdayaan masyarakat
  Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif.
- Kesejahteraan rakyat
  Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, serta penangulangan korban bencana alam banjir tahunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Gresik merumuskan tema pembangunan "Peningkatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pemerataan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat."

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik " Terwujudnya Gresik yang agamis, adil, sejahtera dan berkehidupan yang berkualitas." Menetapkan Misi ke-2

"Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemrintahan yang baik."

Sasaran pada urusan kecamatan meliputi sasaran ke-3 yaitu "Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif ditingkat kecamatan."

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap kajian kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Sedangkan SKPD Kecamatan Benjeng dalam proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

SKPD Kantor Kecamatan Benjeng selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan SDM aparatur yang baik. Mendorong masyarakat dalam pembangunan partisipatif, dengan keamanan lingkungan yang kondusif, dan peningkatan taraf hidup rakyat miskin agar lebih sejahtera. Kebijakannya yang diambil adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan tertib administrasi kantor dan mutu pelayanan administrasi kepada masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.
3) Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan partisipatif.
5) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan taraf hidup masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna antara lain; Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra; Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan administrasi kantor. Adapun sasarannya Peningkatan kualitas pelayanan.
2) Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang lengkap. Sasarannya adalah Pelaksanaan pengadministrasian dokumen pemerintahan desa.
3) Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif. Sasarannya Ketentraman dan ketertiban lingkungan yang kondusif.
4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan di desa.
5) Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Dalam mengimplementasikan kinerja SKPD Kantor Kecamatan Benjeng yang termasuk dalam kategori urusan wajib Pemerintahan Umum, maka ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   d. Penyediaan makanan dan minuman
   e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
   f. Penyediaan jasa administrasi kantor
   g. Penyediaan jasa operasional kantor

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a. Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor rumah tangga
   b. Pemeliharaan rutin, berkala kantor, gedung, rumah tangga.
   c. Pemeliharaan rutin, berkala kendaraan jabatan, dinas, operasional.
   d. Pemeliharaan rutin, berkala peralatan, perlengkapan kantor, rumah tangga.
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   b. Penyusunan rencana kerja SKPD
4) Program koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik
   a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan beras miskin dan santunan kematian
   b. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
   c. Optimalisasi pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi

3.4. Urusan Pilihan

I. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   1) Program koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa
      - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
II. Perencanaan Pembangunan
   1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
      - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   2) Program koordinasi pelaksanan pembangunan
      - Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan
III. Pemberdayaan masyarakat dan desa
   1) Program koordinasi pengelolaan keuangan, asset dan perekonomian desa.
      - Monitoring dan evaluasi ADD
      - Monioring, evaluasi dan pelaporan pembangunan ekonomi desa
      - Fasilitasi pemberdayaan UPKU dan BUMDES
IV. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
   1) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
      - Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
      - Kegiatan Musbaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)
      - Monitoring dan evaluasi pelaporan

BAB IV
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Tahun 2016 – 2022 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Benjeng tahun 2018.
2. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan tahun 2018 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.
3. Rencana Kerja Kecamatan Benjeng tahun 2018 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2018 dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Serta dapat dibangun komitmen bersama untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja yang keluar dari kesepakatan dalam rencana kerja ini.

USULAN PROGRAM KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN BENJENG

No.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Pagu Indikatif			
				Tahun 2018		Perkiraan n+1 (Tahun 2019)	
				Target	Rp	Target	Rp
	Misi Ke-2 : Menciptakan tat kelola kepemerintahan yang baik melalui pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan akuntabilitas.						
	NON URUSAN				**2.673.504.200**		**529.484.170**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai Survei Kepuasan masyarakat (SKM)**	**Baik**	**Baik**	**224.234.700**	**Baik**	**246.658.170**
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5 kali (3 jenis)	5 kali (3 jenis)	10.000.000	5 kali (3 jenis)	11.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan	100 %(12 bulan)	12 bulan (5 jenis)	15.890.000	12 bulan (5 jenis)	17.479.000

No.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Pagu Indikatif			
				Tahun 2018		Perkiraan n+1 (Tahun 2019)	
				Target	Rp	Target	Rp
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis media cetak	3 jenis (12 bulan)	3 jenis (12 bulan)	4.000.000	3 jenis (12 bulan)	4.400.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun	2.229 dus	2.229 dus	31.508.400	2.229 dus	34.659.240
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas pegawai selama 1 tahun	417 kali	417 kali	11.627.000	417 kali	12.789.700
	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor, pengelola keuangan dan aset.	17 orang	17 orang	78.213.300	17 orang	86.034.630
	Penyedia jasa operasional kantor	Persentase pemenuhan jasa telkom listrik air, petugas kebersihan, jasa servis peralatan kantor lainnya	100%	100%	72.996.000	100%	80.295.600
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur**	**Nilai Survei Kepuasan masyarakat (SKM)**	**Baik**	**Baik**	**2.425.269.500**	**Baik**	**252.826.000**

No.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Pagu Indikatif			
				Tahun 2018		Perkiraan n+1 (Tahun 2019)	
				Target	Rp	Target	Rp
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan pendopo kantor Kecamatan Benjeng, dan Rehab pagar jembatan halaman kantor	1 paket		2.196.000.000	-	-
	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga	Persentase tersedianya ATK, alat kebersihan, alat listrik dan pengadaan alat kantor lainnya	100%	100%	72.481.000	100%	79.800.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kantor/rumah tangga	Jumlah perawatan gedung kantor dan rumah dinas	2 gedung	2 gedung	86.350.000	2 gedung	94.985.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peresentase pemeliharaan kendaraan dinas	100%	100%	57.310.000	100%	63.041.000
	Pemeliharaan rutin berkala peralatan/perlengkapan	Persentase servis komputer, AC dan audio visual	100%	100%	13.128.500	100%	15.000.000
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Nilai Survei Kepuasan masyarakat (SKM)**	**Baik**	**Baik**	**-**	**Baik**	**-**

No.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Pagu Indikatif			
				Tahun 2018		Perkiraan n+1 (Tahun 2019)	
				Target	Rp	Target	Rp
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai Survei Kepuasan masyarakat (SKM)**	**Baik**	**Baik**	**24.000.000**	**Baik**	**30.000.000**
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan kinerja yang akuntabel	4 dokumen	4 dokumen	12.000.000	4 dokumen	15.000.000
	Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	12.000.000	4 dokumen	15.000.000
	URUSAN WAJIB						
	Urusan Tata Kelola Pemerintahan Umum				**100.000.000**		**110.000.000**
1	**Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.**	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif (PKK dan Kartar)	80%	**85%**	**60.000.000**	**90%**	**66.000.000**
	Pemberdayaan Organisasi Wanita	Persentase kegiatan pembinaan rutin PKK	80%	85%	40.000.000	90%	44.000.000

No.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Pagu Indikatif			
				Tahun 2018		Perkiraan n+1 (Tahun 2019)	
				Target	Rp	Target	Rp
	Pemberdayaan Organsasi Kepemudaan	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	80%	85%	20.000.000	90%	22.000.000
2	**Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik**	**Nilai Survei Kepuasan masyarakat (SKM)**	**Baik**	**Baik**	**82.000.000**	**Baik**	**195.200.000**
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin dan Santunan Kematian	Cakupan pemberian santunan kematian dan raskin sesuai dengan masy miskin	100%		25.000.000		27.500.000
	Pembinaan dan Pengawasan Program UKS	Terselenggaranya koordinasi pembinaan UKS Kecamatan Benjeng	70%	70%	20.000.000	80%	22.000.000
	Pembinaan Administrasi Kependudukan				-		-
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa				-		-
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa				-		-
	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa				-		-

No.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Pagu Indikatif			
				Tahun 2018		Perkiraan n+1 (Tahun 2019)	
				Target	Rp	Target	Rp
	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Gresik				-		-
	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kebomas				-		-
	Pemantauan PILKADES	Terlaksananya pilkades yang aman dan tertib	23 desa	-	-	21 desa	105.000.000
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah senam kesegaran jasmani dan gerak jalan kecamatan	100%	100%	22.000.000	100%	24.200.000
	Penyebarluasan Media Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase berita web informasi kecamatan terupdate secara berkala	100%	100%	15.000.000	100%	16.500.000
	Koordinasi Pelaksanaan kebijakan Kependudukan			-	-	-	-
	Sosialisasi dan Bimbingan teknis dana kelurahan dan Desa			-	-	-	-
	Verifikasi dan Evaluasi APBDES			-	-	-	-
3	**Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa**	**75%**	**85%**	**50.000.000**	**90%**	**55.000.000**

No.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Pagu Indikatif			
				Tahun 2018		Perkiraan n+1 (Tahun 2019)	
				Target	Rp	Target	Rp
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa	Persentase monev pengelolaan keuangan desa	75%	85%	25.000.000	90%	27.500.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan ekonomi desa	Persentase monev pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Benjeng	75%	85%	25.000.000	90%	27.500.000
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi KOPWAN				-		-
	Pembinaan UPKU/Bumdes				-		-
	Koordinasai Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi				-		-
	Pelatihan dan Pembinaan Manajemen lembaga ekonomi desa				-		-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan UKM	Persentase monev UKM Kecamatan Benjeng	75%	85%	25.000.000	90%	27.500.000
	Fasilitasi pemberdayaan UPKu / Bumdes	Jumlah Pembinaan Upku/Bumdes	75%	85%	25.000.000	90%	27.500.000

No.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Pagu Indikatif			
				Tahun 2018		Perkiraan n+1 (Tahun 2019)	
				Target	Rp	Target	Rp
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Konflik dalam wilayah Kecamatan;**	**75%**	**85%**	**138.600.000**	**90%**	**144.460.000**
	Pengendalian Keamanan dan Kenyaman Lingkungan	Jumlah pembinaan dan pemantauan situasi lingkungan	75%	85%	83.600.000	90%	91.960.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KANTRANTIBMAS	Persentase monev dan pelaporan situasi wilayah dan warung liar	75%	85%	25.000.000	90%	27.500.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar				-		-
	Penyuluhan Pencegahan Pengengunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda				-		-
	Pengamanan Kegiatan Masyarakat				-		-
	Pembinaan LPTQ Kecamatan	Persentase pembinaan LPTQ Kecamatan	75%	-	-	90%	25.000.000
	Kegiatan MTQ Tingakat Kabupaten	Persentase keikutsertaan dalam lomba MTQ Kabupaten	100%	100%	30.000.000	-	-
	Pembinaan Anggota LINMAS						

No.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Pagu Indikatif			
				Tahun 2018		Perkiraan n+1 (Tahun 2019)	
				Target	Rp	Target	Rp
			-	-	-	-	-
	Pembinaan Keagamaan		-	-	-	-	-
	Kegiatan FKUB Kecamatan		-	-	-	-	-
	Pencegahan Tindak Kriminal		-	-	-	-	-
5	**Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**	**Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Efektif dan Efesien**	**75%**	**85%**	**25.000.000**	**90%**	**27.500.000**
	Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah peserta musrenbang kecamatan	75%	85%	25.000.000	90%	27.500.000
	Profil Desa dan Kecamatan		-	-	-	-	-
Jumlah Total					**2.773.504.200**		**639.484.170**